

**PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA FUNGSI
KESEHATAN, DAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**



Skripsi Oleh:

AURA PUTRI TUAH CINDONA

01021282126078

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

**PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA
FUNGSI KESEHATAN, DAN BELANJA FUNGSI
PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Disusun Oleh

Nama : Aura Putri Tuah Cindona
NIM : 01021282126078
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional

Disetujui digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing



Tanggal 28 Juli 2025

Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA FUNGSI KESEHATAN, DAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Disusun oleh:

Nama : Aura Putri Tuah Cindona
NIM : 01021282126078
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 31 Juli 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 27 Agustus 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Dosen Penguji



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
17-7-2025
Fakultas Ekonomi UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aura Putri Tuah Cindona
NIM : 01021282126078
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembimbing : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Penguji : Feny Marissa, S.E., M.Si
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 31 Juli 2025

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 27 Agustus 2025

Pembuat Pernyataan,

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 17-9-2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Aura Putri Tuah Cindona
NIM. 01021282126078

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal (sesungguhnya) ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal (sesungguhnya) amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(Q.S Al Baqarah: 216)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca agar terwujudnya penyempurnaan pada skripsi ini, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif untuk berbagai pihak yang membacanya.

Indralaya, 27 Agustus 2025

Penulis



Aura Putri Tuah Cindona
NIM. 01021282126078

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta kemudahan dalam setiap langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta menyokong penulis baik secara akademik maupun motivasi.
5. Ibu Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis melalui tahapan penyusunan skripsi ini, serta memberikan nasihat dan arahan yang sangat berarti.
6. Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si, selaku dosen penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, serta membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
7. Ibu Mardalena, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing pada tahap penyusunan proposal skripsi, yang telah memberikan arahan dan masukan hingga tersusunnya proposal penelitian ini.
8. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si, selaku dosen penguji pada tahap seminar proposal skripsi, yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan rancangan penelitian ini.

9. Bapak Darta Pratama Atiyatna, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, wawasan, dan semangat untuk terus berkembang secara akademik maupun pribadi.
11. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
12. Kedua orang tua, yaitu Papa Dr. Panca Tuah Tuha, S.Si., M.M dan Mama Afriawita, S.Pd, atas doa, perhatian, serta dukungan moril maupun materil yang telah diberikan selama masa studi. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada saudara, Muhammad Adam Zahari Al Hamidi, yang telah memberikan semangat.
13. Seluruh teman-teman mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2021, yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.

Indralaya, 27 Agustus 2025

Penulis,



Aura Putri Tuah Cindona
NIM. 01021282126078

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA FUNGSI KESEHATAN, DAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh

Aura Putri Tuah Cindona; Anna Yulianita

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017–2023 dengan pendekatan *Random Effects Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial, belanja pendidikan tidak signifikan dan cenderung berdampak negatif akibat dominasi belanja pegawai yang tidak secara langsung mendukung pengentasan kemiskinan. Belanja kesehatan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan belanja perlindungan sosial berpengaruh positif, yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat justru dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi alokasi dan efektivitas belanja untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, Tingkat Kemiskinan.*

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF EDUCATION FUNCTION EXPENDITURE, HEALTH FUNCTION EXPENDITURE, AND SOCIAL PROTECTION FUNCTION EXPENDITURE ON THE POVERTY RATE IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

By:

Aura Putri Tuah Cindona; Anna Yulianita

This study analyzes the effect of education function expenditure, health function expenditure, and social protection function expenditure on the poverty rate in East Nusa Tenggara Province for the period 2017–2023 using the Random Effects Model approach. The results indicate that the three variables jointly have a significant effect on poverty. Partially, education expenditure is not significant and tends to have a negative effect due to the dominance of personnel spending, which does not directly support poverty alleviation. Health expenditure has a significant negative effect, while social protection expenditure has a positive effect, indicating that the misallocation of assistance that does not align with the actual needs of the community can worsen poverty conditions. These findings highlight the importance of optimizing budget allocation and spending effectiveness to support sustainable poverty reduction efforts.

Keywords: *Education Function Expenditure, Health Function Expenditure, Social Protection Function Expenditure, Poverty Rate*

Acknowledge,
Head of Department of Development
Economics



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Supervisor



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Aura Putri Tuah Cindona
NIM : 01021282126078
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional
Judul : Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju di tempatkan pada lembar abstrak.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP. 197007162008012015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Aura Putri Tuah Cindona
	NIM	01021282126078
	Tempat, Tanggal Lahir	Jambi, 27 Maret 2003
	Alamat	Cambai Agung, Palembang, Sumatera Selatan
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
E-mail	auraaputri27@gmail.com	
Pendidikan		
2009-2014	SD Negeri 47 / IV Jambi	
2014-2015	SD Negeri 157 Palembang	
2015-2018	SMP Negeri 9 Palembang	
2018-2021	SMA Negeri 6 Palembang	
Pengalaman Organisasi		
IMEPA (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan)		
PPSDM - Seksi Koordinator Lapangan dan Kegiatan LKMM 2022 - Seksi Publikasi dan Dokumentasi PKKMB Ekonomi Pembangunan 2022	Moderator Sharing Development “Training College Buddies” 2022	
Pengalaman Kegiatan		
Ketua Usaha "Fleece Puff" Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 2024		
Pengalaman Kerja		
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (2024) OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (2024)		

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Human Capital	14
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	16
2.1.3 Teori Ekonomi Kesejahteraan (<i>Welfare Economics Theory</i>)	19
2.1.4 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	22
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Alur Pikir	30
2.4 Hipotesis	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3 Metode Analisis Data.....	34

3.3.1	Statistik Deskriptif	35
3.3.2	Estimasi Regresi Data Panel	35
3.3.2.1	Common Effect Model (CEM)	36
3.3.2.2	Fixed Effect Model (FEM)	36
3.3.2.3	Random Effect Model (REM)	36
3.3.3	Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	37
3.3.3.1	Uji Chow	37
3.3.3.2	Uji Hausman	37
3.3.3.3	Uji Lagrange Multiplier (LM)	38
3.3.4	Pengujian Asumsi Klasik	38
3.3.4.1	Uji Multikolinearitas	39
3.3.4.2	Uji Heteroskedastisitas	39
3.3.4.3	Uji Normalitas	40
3.3.5	Model Pengujian Hipotesis	41
3.3.5.1	Uji Simultan (Uji F)	41
3.3.5.2	Uji Parsial (Uji t)	41
3.3.5.3	Koefisien Determinasi (R^2)	41
3.4	Definisi Operasional Variabel	42
BAB IV PENELITIAN		44
4.1	Deskripsi Penelitian	44
4.1.1	Profil Daerah	44
4.1.2	Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan	46
4.1.3	Perkembangan Belanja Fungsi Kesehatan	48
4.1.4	Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial	49
4.2	Hasil Penelitian	51
4.2.1	Statistik Deskriptif	51
4.2.2	Pemilihan Model	53
4.2.1.1	Uji Chow	53
4.2.1.2	Uji Hausman	54
4.2.1.3	Uji Lagrange Multiplier	55
4.2.3	Estimasi Regresi Data Panel dengan <i>Random Effect Model</i>	56

4.2.4	Hasil Intersep di Nusa Tenggara Timur.....	59
4.2.5	Uji Asumsi Klasik.....	62
4.2.6	Uji Hipotesis	64
4.2.6.1	Uji F	64
4.2.6.2	Uji t	64
4.2.6.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	65
4.3	Pembahasan	66
4.3.1	Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	66
4.3.2	Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	68
4.3.3	Pengaruh Belanja Fungsi Perlindungan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN.....		78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia	3
Gambar 1. 2 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	4
Gambar 1. 3 Angka Harapan Hidup 2017-2023	6
Gambar 1. 4 Tingkat Penyerapan Belanja Fungsi terhadap Anggaran	8
 Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	31
 Gambar 4. 1 Belanja Fungsi Pendidikan.....	47
Gambar 4. 2 Belanja Fungsi Kesehatan	48
Gambar 4. 3 Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow.....	53
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman	54
Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier	55
Tabel 4. 5 Hasil Regresi Random Effect Model	56
Tabel 4. 6 Nilai Intersep 22 Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	59
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4. 8 Hasil Uji F	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji t.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

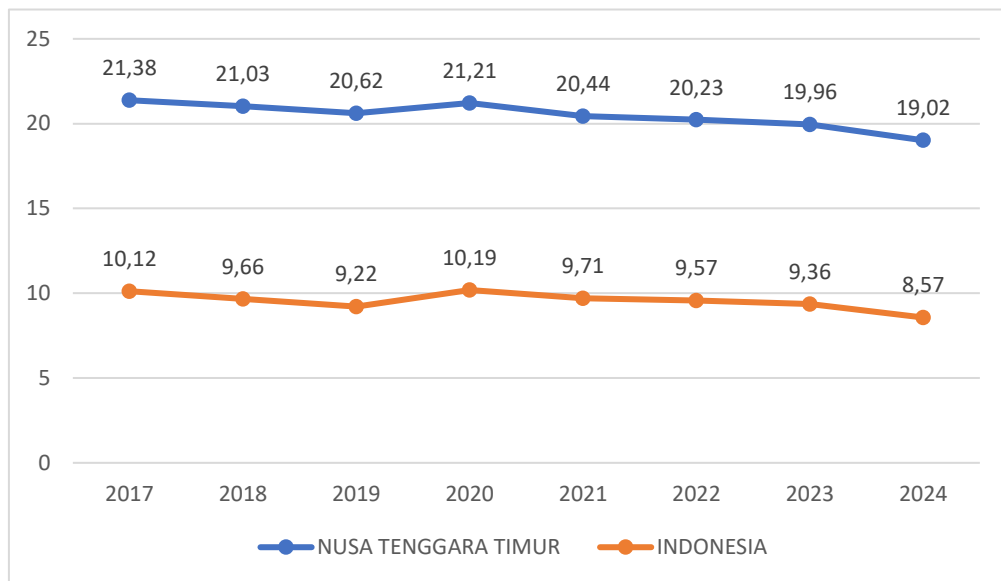
1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan dimensi sosial. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda prioritas pemerintah pusat maupun daerah, sejalan dengan komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya TPB 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.

PBB melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama yang harus dicapai pada tahun 2030, yakni pada Tujuan 1: *No Poverty*. SDGs menekankan bahwa penghapusan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antar aspek pembangunan. Berdasarkan dokumen *Poverty Eradication*, tindakan prioritas dalam pengentasan kemiskinan antara lain, salah satunya meliputi penyediaan akses universal terhadap layanan sosial dasar, pengembangan sistem perlindungan sosial secara bertahap untuk mendukung kelompok masyarakat yang tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan organisasi mereka agar dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan (*UN Department of Economic and Social Affairs*, 2019).

Upaya ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pusat kebijakan, dengan menekankan pentingnya pemberian hak dasar dan perlindungan berkelanjutan bagi kelompok rentan. Nilai-nilai yang tercantum dalam agenda global tersebut menjadi rujukan penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2023 berhasil ditekan hingga 9,36 persen, namun masih terdapat sekitar 25,90 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia diarahkan pada membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui beberapa sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, perlindungan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman untuk mencegah dan menangani risiko kerentanan sosial yang dialami oleh kelompok miskin dan rentan. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif hingga ke tingkat daerah, khususnya di provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur.



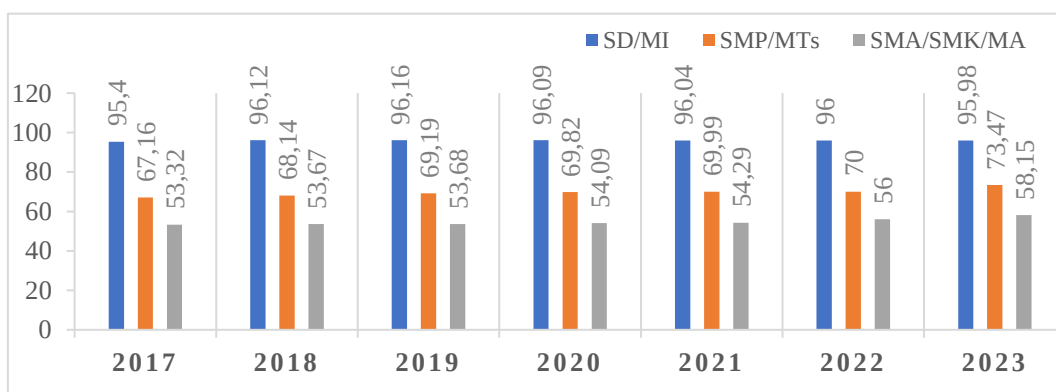
Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
Sumber: BPS 2024

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Maret 2023 tercatat sebesar 19,96 persen atau sekitar 1,14 juta orang, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9,36 persen. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 20,05 persen.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan, dengan menekankan pentingnya penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai langkah preventif terhadap stagnasi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 mencatat bahwa kondisi kemiskinan pada tahun-tahun sebelumnya secara nyata dipicu oleh belum meratanya akses dan kualitas layanan pada ketiga sektor tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bukan sekadar menjadi prioritas dalam perencanaan, melainkan juga merupakan akar persoalan yang telah berlangsung lama. Permasalahan tersebut menjadi tantangan krusial yang harus segera diatasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045. Dalam upayanya membutuhkan kebijakan pembangunan yang konsisten serta pengelolaan anggaran yang efektif dan berkelanjutan pada sektor-sektor strategis tersebut.

Rendahnya kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Salah satu indikator yang merefleksikan kondisi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu persentase anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai. Berdasarkan data APM, terlihat bahwa akses terhadap pelayanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum optimal, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Kesenjangan partisipasi antar jenjang pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat keikutsertaan peserta didik.



Gambar 1. 2 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur

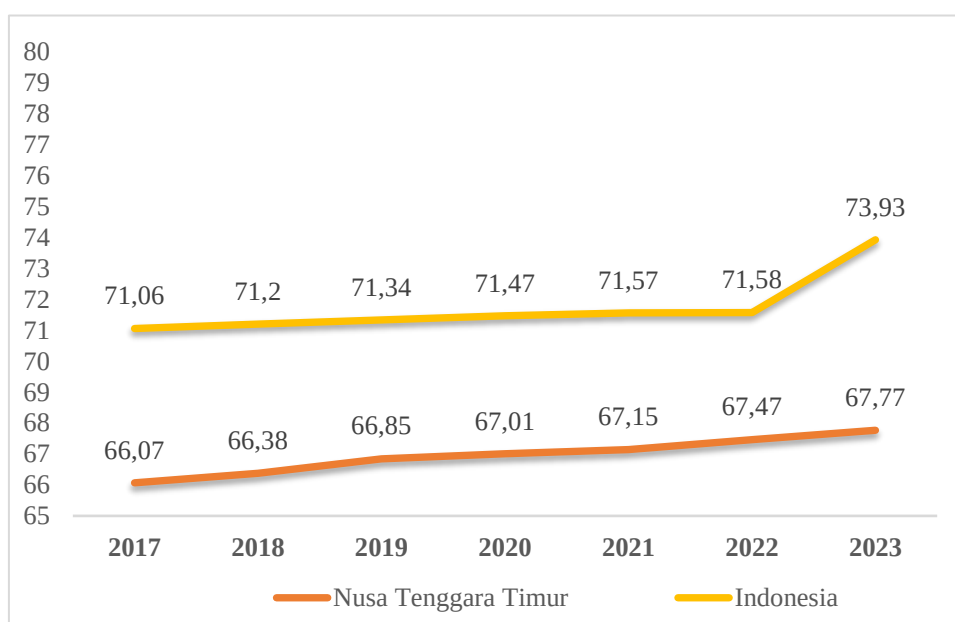
Sumber: BPS 2024

Data APM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi siswa pada jenjang SD/MI cenderung tinggi dan stabil, berada di kisaran 95–96 persen, yang berarti sebagian besar anak usia sekolah dasar telah mendapatkan akses pendidikan. Namun, kondisi berbeda terlihat pada jenjang pendidikan lanjutan. APM untuk jenjang SMP/MTs masih berkisar di angka 67–73 persen, dan yang lebih memprihatinkan adalah APM pada jenjang SMA/SMK/MA, yang bahkan belum menyentuh angka 60 persen dan hanya mencapai 58,15 persen pada tahun 2023.

Kesenjangan APM antarjenjang menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat partisipasinya di Nusa Tenggara Timur. Rendahnya partisipasi tentu berdampak pada kualitas tenaga kerja di masa depan, di mana lulusan pendidikan menengah menjadi prasyarat minimum untuk bersaing di pasar tenaga kerja modern. Akibatnya, banyak penduduk yang hanya mampu bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Kondisi ini mempersempit peluang ekonomi masyarakat dan memperparah ketidakmampuan mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Di sisi lain, sektor kesehatan juga memegang peranan krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena kondisi kesehatan masyarakat secara langsung memengaruhi produktivitas dan kemampuan mereka untuk bekerja secara optimal. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbagai indikator kesehatan masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dan mencerminkan tantangan serius dalam pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan berbagai program dan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan

yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terpadu, dan lintas sektor (BPS, 2023). Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan tersebut adalah Angka Harapan Hidup (AHH), yang merefleksikan rata-rata usia hidup penduduk berdasarkan kualitas layanan kesehatan dan kondisi lingkungan.



Gambar 1. 3 Angka Harapan Hidup 2017-2023 (Persen)

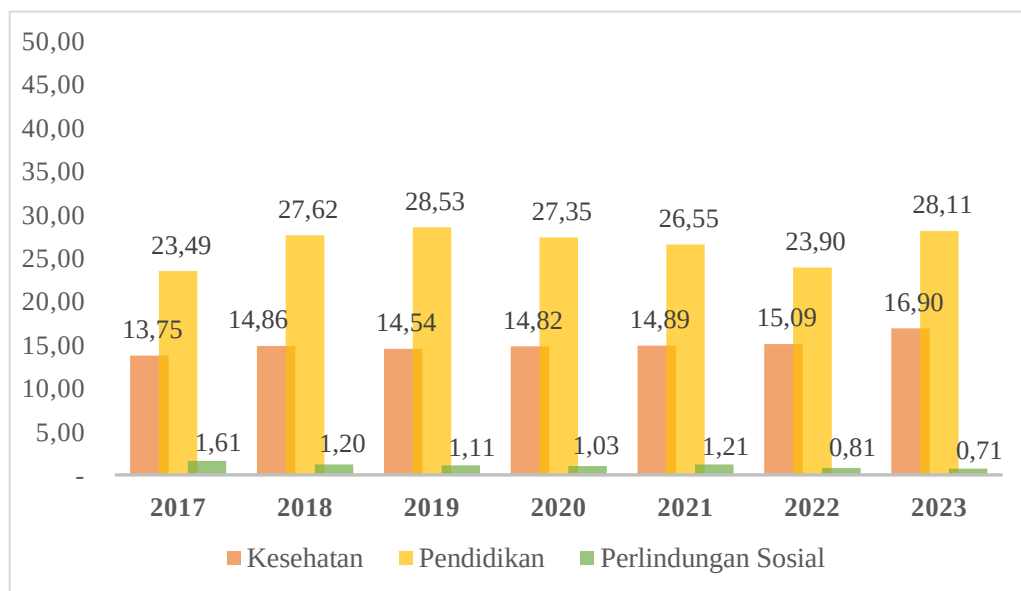
Sumber: BPS 2024

Pada Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan AHH di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia selama periode 2017 hingga 2023. Terlihat bahwa AHH di Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan secara bertahap, dari 66,07 tahun pada 2017 menjadi 67,77 tahun pada 2023. Namun demikian, AHH Nusa Tenggara Timur secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional yang pada periode yang sama juga meningkat, dari 71,06 tahun menjadi 73,93 tahun. Bahkan pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan pada AHH nasional, sementara Nusa Tenggara Timur hanya mengalami peningkatan yang bersifat gradual.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pencapaian derajat kesehatan antara Nusa Tenggara Timur dan wilayah lain di Indonesia. Kesenjangan ini mencerminkan berbagai tantangan struktural, mulai dari terbatasnya akses layanan kesehatan, minimnya ketersediaan dan pemerataan fasilitas medis, hingga kualitas lingkungan hidup yang rendah. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas dan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok miskin yang paling rentan terhadap beban kesehatan. Selain itu, rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk di Nusa Tenggara Timur masih tergolong rendah, memperparah keterbatasan pelayanan, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Terlebih lagi masih tingginya angka stunting, kematian ibu dan bayi, serta prevalensi penyakit menular menunjukkan bahwa tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat miskin belum tertangani secara optimal (Dinas Lingkungan dan Kehutanan Nusa Tenggara Timur, 2025)

Selain pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial juga memegang peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Mengingat berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat miskin, intervensi tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan semata, tetapi juga perlu didukung oleh sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk mencegah terjadinya kerentanan secara berulang. Ketika kondisi kesehatan yang buruk membatasi produktivitas masyarakat, perlindungan sosial hadir sebagai mekanisme penyangga yang membantu mempertahankan kelangsungan hidup dan kesejahteraan dasar, terutama saat terjadi guncangan sosial maupun ekonomi.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, agar kelangsungan hidup individu maupun kelompok masyarakat tetap dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, berbagai program perlindungan sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial dianggarkan untuk memperkuat daya tahan sosial masyarakat. Namun, realisasi dan efektivitas pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya terbatasnya anggaran daerah, kendala dalam distribusi bantuan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang berwenang yang diperkuat pada Gambar 1.4.



Gambar 1. 4 Tingkat Penyerapan Belanja Fungsi terhadap Anggaran (Persen)
 Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.4 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran belanja fungsi pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2017 hingga

2023 untuk tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Terlihat bahwa fungsi perlindungan sosial menerima alokasi anggaran yang paling rendah, bahkan tidak pernah melebihi 2 persen dan hanya mencapai 0,71 persen pada tahun 2023. Sebaliknya, belanja pendidikan dan kesehatan menunjukkan tren alokasi yang jauh lebih besar dan stabil, masing-masing mencapai puncak pada 2019 sebesar 28,53 persen untuk pendidikan dan 16,90 persen untuk kesehatan pada 2023. Ketimpangan alokasi ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan dukungan sektor lain secara sinergis, agar pembangunan manusia dapat berjalan secara holistik dan tidak timpang, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang kuat dalam pengelolaan anggaran berbasis fungsi pembangunan, seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran memberikan dasar pengelompokan anggaran yang jelas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa belanja daerah harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar, fasilitas sosial, dan jaminan sosial yang layak.

Namun demikian, yang lebih penting bukan sekadar besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan bagaimana alokasi tersebut didistribusikan secara strategis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Belanja pendidikan, misalnya, diwajibkan memperoleh alokasi minimal 20 persen dari APBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena berkontribusi langsung terhadap

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Belanja kesehatan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur kewajiban alokasi dari APBD untuk sektor tersebut. Sementara itu, fungsi perlindungan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko akibat guncangan serta kerentanan sosial, sekaligus memperkuat ketahanan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Ketidakseimbangan alokasi belanja antar fungsi pembangunan mencerminkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara menyeluruh dan saling mendukung. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, belanja fungsi perlindungan sosial masih menunjukkan tingkat alokasi yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor pendidikan dan kesehatan sepanjang periode 2017–2023. Rendahnya porsi belanja untuk perlindungan sosial berpotensi memperlemah efektivitas program pengentasan kemiskinan, terutama karena sektor ini memegang peranan penting dalam menopang kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, serta dalam merespons risiko sosial yang kerap dialami masyarakat rentan.

Situasi ini sejalan dengan sorotan dalam dokumen *Poverty Eradication*, yang menegaskan bahwa tindakan prioritas dalam pengentasan kemiskinan meliputi penyediaan akses universal terhadap layanan sosial dasar, pengembangan sistem perlindungan sosial secara bertahap, dan pemberdayaan masyarakat miskin agar

dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Ketika belanja sektor pendidikan dan kesehatan telah memperoleh porsi alokasi yang relatif lebih besar, rendahnya alokasi pada fungsi perlindungan sosial menunjukkan masih adanya celah dalam pendekatan kebijakan pengentasan kemiskinan yang terpadu. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan instrumen fiskal belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan kelompok miskin secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penting dilakukan kajian empiris untuk menganalisis sejauh mana belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan literatur terkait efektivitas belanja publik berbasis fungsi, tetapi juga menyediakan bukti ilmiah sebagai dasar perumusan kebijakan anggaran yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berpihak pada kelompok miskin. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memperkuat peran belanja daerah sebagai instrumen strategis dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi seperti Nusa Tenggara Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik penulisan latar belakang, maka terdapat perumusan masalah dalam penelitian, yaitu “Bagaimana pengaruh belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan belanja fungsi perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari masalah di atas adalah untuk menganalisis pengaruh belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan belanja fungsi perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan memberi dampak positif bagi berbagai pihak, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengayaan kajian ilmiah di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Selain memperkuat basis empiris dalam literatur, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan studi tentang efektivitas pengelolaan belanja daerah, ketimpangan pembangunan, serta strategi pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah tertinggal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan awal atau referensi pendukung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam analisis, penyusunan, atau evaluasi kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam hal pengalokasian anggaran pada sektor-sektor strategis. Meskipun cakupannya bersifat akademik, temuan yang dihasilkan tetap memiliki potensi untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam diskusi ilmiah, forum kebijakan, atau penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, R., Ramadhanti, A. W., & Muttaqien, M. (2024). Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam Iklan Pengobatan Alternatif di Media Luar Griya. *Jurnal Audiens*, 5(4), 735–743.
- Baran, S. (2011). *EBOOK: Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture*. McGraw Hill.
- Dewan Periklanan Indonesia. (2020). *Etika Pariwara Indonesia*.
- Dwi Laksono, R., Judijanto, L., Pratiwi Batubara, R., & Mukjizat Sakti, S. R. I. R. (2024). *Pengantar Komunikasi Dasar-Dasar Komunikasi Efektif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Farkhani, R. R., & Sujianto, T. V. (2024). *Perkembangan Teknologi Penyiaran Televisi di Indonesia : Tantangan dan Peluang Televisi Lokal dalam Era Digitalisasi*. 82–94.
- Fauzan, M. R., Farransahad, B. F., Rahmawati, N., & Junaedi, F. (2023). Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam Iklan TVC Paramex dan Garnier Micellar Water Tahun 2023. *Jurnal Bincang Komunikasi*, 1(2), 86–94.
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Ginting, R., & Pratiwi, S. (2017). Analisis Literasi Media Televisi dalam Keluarga. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 5(2), 109–122.
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2020). Komunikasi massa. In *Komunikasi Massa*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Haryadi, T., Senoprabowo, A., & Sulistiyawati, P. (2021). Analisis Perubahan Trend Iklan Gojek Versi Video Animasi dalam Sudut Pandang Media Dependency. *Amarasi: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 2(01), 16–27.
- Juditha, C. (2015). Televisi Lokal dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo Tv Kendari) Local Television and Local Wisdom Content (Case Study

- in Sindo Tv Kendari). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 16(1), 49–64.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2016). *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran*.
- KPI. (2025). *P3SPS KPI: Pilar Etika dan Standar Penyiaran Indonesia*. <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37621-p3sps-kpi-pilar-etika-dan-standar-penyiaran-indonesia?detail3=23921>
- Lovita, L., Dzakiyah, U., Angelika, R., & Natasya, Y. (2023). Analisis Pengaruh Media Sosial melalui Aplikasi Digital Tiktok sebagai Media Persuasif terhadap Penerapan Etika Berkomunikasi pada Mahasiswa. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 10(1), 181–192.
- Lubis, S., Asbi, A., & Lesmana, G. (2023). Penerapan Layanan Konseling Individual Menggunakan Pendekatan Person Centered Therapy untuk Meningkatkan Etika Komunikasi pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 23 Medan Tahun Ajaran 2022/2023. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 1(1), 10–20.
- Luhglatno. (2024). *Metode Penelitian Manajemen*. Eureka Media Aksara.
- Mamis, S., Judijanto, L., Jamil, F., Hajar, A., & Tadius, T. (2025). *Seni Berkomunikasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Mukti, I., Oruh, S., & Agustang, A. (2021). Efek Pemberitaan Kekerasan di Media Sosial terhadap Citra Negatif Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).
- Nugraha, A. R. (2016). Pengaruh Terpaan Iklan Obat Non Resep dengan Sikap Masyarakat (Studi regresi sederhana mengenai terpaan iklan obat-obat non resep yang tayang pada televisi dengan sikap masyarakat terhadap keputusan pembelian). *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 173–182.
- Pasaribu, R. (2019). Iklan BKKBN: Representasi Peran Perempuan Dalam Iklan Layanan Masyarakat. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*.

Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pasal 58 Tentang Siaran Iklan (2012).

Putri, C. N., Anandya, D. P., & Hardinata, A. P. (2023). Pelanggaran Etika dan Hukum Penyiaran dalam Program Siaran 86 NET TV. *Jurnal Audiens*, 4(4), 520–530.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*.

Revaya, M., & Muksin, N. N. (2023). Analisis Pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia dalam Iklan Le Minerale versi Pesan dari Ikatan Dokter Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 7(2).

Santosa, B. A. (2017). Peran media massa dalam mencegah konflik. *Jurnal Aspikom*, 3(2), 199–214.

Saputri, V. A., Damayanti, A., & Jayaningsih, E. (2023). Tinjauan Etika dalam Konten Penjualan di Akun@ DavienaSkincare. *Jurnal Audiens*, 4(4), 564–570.

Sari, I. (2020). *Resepsi Khalayak Tentang Isi Pesan Iklan Pengobatan Alternatif Klinik Terapi Zona Pada Stasiun Palembang TV*.

Setiadi, M. D. (2024). Etika dan Dampak Komodifikasi Komunikasi dalam Industri Media Massa. *Sintesa*, 3(02), 38–61.

Setyaningsih, L. A. (2016). Desain Konsep Tentang Konten Lokal pada Televisi Lokal untuk Mengembangkan Wisata Kuliner Kota Malang. *Jurnal Nomosleca*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v2i2.1198>

Sidharta, G. M. (2018). Etika Periklanan dalam Komunikasi Massa. *Researchgate. Net*, 29.

Sudarmawan, W. (2017). Akrab Pentingnya Membangun Brand Bagi Usaha Radio Siaran Komersial Lokal di DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, 2(1).

- Supardi, S., Susyanti, A. L., & Herdarwan, H. (2019). Kajian Kebijakan tentang Informasi dan Pelayanan Obat yang Mendukung Pengobatan Sendiri di Masyarakat. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 29(2), 161–170.
- Ulfa, A., & Syam, H. M. (2017). Pelanggaran Pedoman Periklanan Obat Tradisional Menteri Kesehatan oleh Media Cetak Di Aceh (Studi Kasus Media Cetak Harian Serambi Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(1), 86–100.
- Ummah, A. H. (2022). *Manajemen industri media massa*. Syiah Kuala University Press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 5 Tentang Asas, Tujuan, Fungsi, Dan Arah (2002).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 7 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia (2002).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Indonesia 1 (2002).
- Wulandari, T., Hartawan, Y., Krisnayanti, N. I., & Dirgana, R. T. (2024). Komunikasi Efektif melalui Public Speaking dalam Meningkatkan Kemampuan Soft Skill Siswa Zilenial SMA Negeri Bandung. *Jurnal Media Pengabdian Komunikasi*, 4(1), 71–82.